BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Adanya hubungan antar bangsa sudah lama terjadi dan hubungan tersebut berlangsung dalam suatu masyarakat yang disebut dengan masyarakat antar bangsa. Hubungan yang semula dalam bentuk primitif kemudian berkembang ke dalam bentuk yang lebih *modern*. Hubungan tersebut terjadi karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan sebuah negara, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.

Di dalam suatu negara paling sedikit terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Untuk memenuhi semua kebutuhan suatu negara tidak mungkin dapat dilakukan dengan sendirinya maka dari itu negara tersebut membutuhkan negara lainnya sehingga tercipta suatu hubungan internasional. Ilmu Hubungan Internasional merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara atau antar *individu* dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan (hankam) atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, pastinya terdapat faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong kerjasama antar negara yang nantinya kerjasama tersebut tunduk terhadap hukum sesuai dengan hukum yang dianut negaranya masing-masing. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional tersebut.

Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, karena adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut maka seringkali yang menjadikan mengapa suatu hubungan internasional dianggap penting bagi kehidupan suatu bangsa. Perwita dan Mochammad Yani menyatakan bahwa :

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat.

Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing-masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani adalah sebagai berikut:

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan Internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

2. Konsep Pengaruh. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional. Berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Suatu negara tidaklah dapat berjalan tanpa ada hubungan negara lain. Bantuan dan kerjasama dengan negara lain pastilah dibutuhkan. Bentuk kerjasama dapat berupa kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tujuannyapun berbeda-beda bagi setiap negara, salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Menurut Kusuma Atmaja, hubungan dan kerjasama antar bangsa muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus sangatlah penting untuk

memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling peduli antar bangsa di dunia (Rudy,2002 : 12).

Secara umum, kerjasama internasional ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama internasional tersebut ditujukan sebagai berikut :

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para negara anggota.
2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi.
3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangkas kerjasama ekonomi di antara para anggota.
4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggota (Tambunan, 2000 : 45).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri.

Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> “Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau

> membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsill,2008 : 21).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. Europe, America, *and Nontariff Barriers to Trade* bahwa :

> kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan objektif dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Menurut Perwita & Yani bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

2.1.3 Kerjasama Bilateral

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjungan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002 : 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> "Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002 : 15-16).

Dari definisi tersebut bahwa kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun secara berjauhan. kerjasama bilateral yang terjalin antar 2 negara agar dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara.

Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap kerjasama bilateral mengandung kepentingan- kepentingan strategis dan sasaran utama dari negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Menurut Muhammad Iqbal Fadillah membangun saling pengertian antar negara , Fadillah mengemukakan bahwa:

> "Kerjasama Bilateral adalah suatu kerjasama antara dua negara dalam bidang- bidang tertentu, misalnya kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU). Kerjasama bilateral dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan dinegaranya masing-masing" (Fadillah,2005 : 1).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

2.1.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudi, 2002 : 116).

Menurut Hans Morgenthau kepentingan nasional adalah penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling utama bagi kelestarian negara. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur kebutuhan yang sangat utama bagi negara yaitu mencakup kepentingan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

Karena tidak ada *interest* secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintah, maka konsepsi ini dapat lebih akurat jika dianggap sebagai "*national interest*". Manakala sebuah Negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingan nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak dihiraukan sama sekali terhadap prinsip-prinsip *moral universal*, maka negara tersebut dapat diungkapkan sebagai kebijaksanaan realis, berlawanan dengan kebijakan idealisyang memperhatikan prinsip moral internasional.

Kepentingan nasional suatu negara dalam kurun waktu tertentu berbeda dengan kurun waktu lainnya, sehingga mengakibatkan keadaan politik internasional selalu berubah-ubah. Akan tetapi bagaimanapun juga perubahan politik internasional, kebijakan luar negeri harus selalu mengabdi kepada kepentingan nasional. Unsur fundamental politik luar negeri terdiri dari dua elemen, yaitu: tujuan nasional yang ingin dicapai dan *instrument* yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan nasional yang ingin dicapai dapat dilihat pada kepentingan nasional suatu negara, sedangkan *instrument* untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi

dari kebijakan politik luar negeri (Kamus Hubungan Internasional Putra A Bardin, 1999).

Adapun salah satu bentuk dari kepentingan nasional ialah dibuatnya bentuk kerjasama *partnership*. Menurut pendapat Eisler, Rione & Montuori, Alfonso ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama.

Dan ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setara dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pemberian bantuan beasiswa Pemerintah Australia kepada pelajar Indonesia, sumbangan dana dan sebagainya terhadap hubungan bilateral Australia-Indonesia dapat memberi manfaat pada kedua belah pihak baik Indonesia dan Australia dalam aspek politik-keamanan, sosial budaya dan ekonomi.

Kerjasama dalam bidang pendidikan didasari oleh latar belakang sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang banyak memiliki perbedaan antara kedua negara, sehingga dengan adanya kerjasama tersebut akan memberikan kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan bersama seperti dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, kepentingan ekonomi, menghindari konflik

antara negara serta perasaan saling mempercayai dan saling menghormati kedua negara dalam aspek sosial budaya.

Kerjasama tersebut tidak hanya memberikan manfaat berupa materi seperti: pembangunan fisik prasarana pendidikan dan manfaat ekonomi lainnya, namun bisa pula dalam bentuk peningkatan kapasitas (peningkatan hubungan bilateral, peningkatan kapasitas layanan pendidikan kedua negara), bertambahnya akses seperti untuk lebih memahami kondisi sosial budaya kedua negara, serta saling menguntungkan (http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t9940.pdf diakses pada tanggal 25 Mei 2017).

2.1.5 Kebudayaan dan Pendidikan dalam Kajian Hubungan Internasional

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dapat dipelajari. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.

Melville J.Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-

Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain yang kemudian disebut Superorganic. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius dan lain-lain yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Eppink, 2013: 3). Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaranigrat, kebudayaan dapat diartikan sebagai:

> "Seluruh total dari hasil pikiran, cipta, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan yang karena itu hanya bias dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Kebudayaan dalam dimensi ini mencakup hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya" (Koentjaraningrat. 2002: 17).

Kemudian pada tanggal 26 Juli hingga 6 Agustus 1982 telah diadakan *World Conference on Cultural Policies* di Mexico City yang disponsori oleh UNESCO . Konferensi ini menghasilkan suatu kesepakatan bahwa : kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan

kehidupan bermasyarakat (http://www.culturalrights.net/en/documentos.php. diakses pada 30/09/2013).

Untuk melihat bagaimana sesungguhnya kebudayaan itu, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam kebudayaan itu sendiri. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan mengenai komponen atau unsur kebudayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.
2. Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok yang meliputi:

a) Sistem norma sosial yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya.
b) Organisasi ekonomi
c) Alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama)
d) Organisasi kekuatan (politik) (Koentjaraningrat, 2002:13).

Dengan berkembangnya sektor kebudayaan dan kepariwisataan maka dengan sendirinya akan mendorong terwujudnya pencapaian perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas angkatan kerja, revitalisasi institusi ekonomi serta peningkatan produk dan stabilitas harga produk ekonomi rakyat. Di samping itu pembangunan bidang ini akan meletakkan dasar kuat bagi terbentuknya jati diri dan karakter bangsa. Hal ini penting untuk disadari karena di era globalisasi ini setiap negara berlomba mendapatkan kedudukan di tingkat internasional.

Adapun konteks pendidikan, dalam hubungan internasional yang dijelaskan dalam buku "Refleksi Teori Hubungan Internasional : dari Tradisional ke Kontemporer" yang ditulis oleh Asrudin dan Mirza Jaka Suryana tahun 2009.

> "Dalam beberapa waktu ini, fenomena hubungan internasional telah dan akan terus menunjukkan kompleksitas yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan bukan saja pada semakin beragamnya aktor hubungan internasional yang saling berinteraksi (*the actors*), tetapi juga ditunjukkan dengan semakin bervariasinya isu (*the issues*) yang diperbincangkan dalam hubungan internasional serta semakin rumitnya proses interaksi (*the process*) seperti itu mengenai kemiskinan, pendidikan dasar secara universal, kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, pembangunan lingkunan, dan kemitraan global untuk pembangunan yang terjadi antar berbagai aktor hubungan internasional" (2009 : 34).

Adapun keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh fenomena yang terjadi dalam perubahan sistem internasional. Seperti yang disebutkan oleh *The United Nations Educational*, *Scientific* dan *Cultural Organization (UNESCO)* menyatakan tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kolaborasi internasional melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka penghormatan *universal* lebih lanjut untuk keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia bersama dengan kebebasan dasar yang diproklamirkan dalam Piagam PBB.

Pendidikan secara kelembagaan sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia. Ini menunjukkan sebuah hasil dari perkembangan menuju ke modernisasi produk sejarah dari tiga peristiwa penting dalam pusat Perang Dunia II. Pertama adalah kemunculan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Di tahun 1950-an Amerika Serikat memainkan tanggung jawab dalam mengatur dunia. Kedua ada sebuah penyebaran sekelompok pergerakan komunis dunia.

Ketiga ada disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika dan Amerika Latin memberikan kemerdekaan untuk negara baru di dunia. Ketiga hal tersebut memberikan pandangan bahwa pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya membangun kekuatan politik oleh negara yang memenangkan Perang Dunia ke II.

Dimana pasca Perang Dunia ke II, negara-negara maju tidak lagi menggunakan konflik fisik untuk membangun kekuatan tapi lebih kepada pengembangan pendidikan dengan tujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap negara-negara lain. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa pendidikan tidak dapat terlepas dari nuansa politik bahkan hal keagamaan seperti fatwa sekalipun tidak dapat berdiri sendiri tanpa politik (Salim & Azra, 2003: 168).

Pendidikan sebagai usaha sadar yang memerlukan tujuan, tanpa adanya tujuan maka pelaksanaan pendidikan tidak akan teratur. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan hasil yang diharapkan dalam proses pendidikan tersebut.

Hal ini merupakan kewajiban untuk pemerintah baik secara hukum ataupun politik dalam hal untuk menyediakan pendidikan dengan kualitas yang baik serta untuk melaksanakan dan memantau lebih efektif strategi pendidikan. Pendidikan adalah sebuah alat yang ampuh dimana anak-anak ataupun orang dewasa yang terpinggirkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat diri dari kemiskinan dan perpartisipasi sepenuhnya sebagai warga negara. Katarina Tomasevski, mengemukakan empat ciri-ciri yang esensial dalam mengukur tingkat kualitas

pendidikan dan perlu diperhatikan baik untuk *primary education*, *secondary education*, maupun *higher education*. Empat ciri-ciri itu adalah:

a. *Availability* (ketersediaan), dimana pendidikan harus tersedia dalam jumlah memadai, seperti bangunan sebagai perlindungan fisik, fasilitas sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan, laboratorium komputer dan teknologi informasi).

b. *Accessibility* (dapat diakses), pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksebilitas mempunyai tiga dimensi karakteristik umum, yakni: (a) semua orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi, (b) aksesbilitas fisik atau gedung sekolah harus aman, dan (c) biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.

c. *Acceptability* (dapat diterima), bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas.

d. *Adaptability* (kesesuaian), pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespons kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya (Jayadi, 2005: 22-25).

2.2 Kerangka Pemikiran

Di dalam Piagam PBB tentang Deklarasi *Universal of Human Rights* 1948 tertuang hak-hak asasi manusia seperti yaitu hak berpendidikan yang terdapat di

pasal 26 dan hak kehidupan berbudaya di pasal 27. Setiap hak-hak tersebut ialah tugas wajib negara dan demi pencapaian tersebut maka negara wajib berupaya demi tercapainya hak asasi manusia dalam memperoleh pendidikan dan kehidupan berbudaya.

Disamping pendidikan menjadi hak setiap manusia, pendidikan juga memainkan peran penting bagi suatu negara dan bangsa dimana pendidikan berperan dalam membangun karakter bangsa. Pendidikan mampu menjadikan bangsa menjadi manusia yang benar-benar manusia yang mengerti akan potensinya, mengenal Tuhan dan dapat mengantarkan manusia menjadi manusia yang memandang manusia lain seperti dia memandang dirinya sendiri.

Pendidikan mengajarkan perilaku yang benar atau mengajarkan sikap bagaimana memiliki budi pekerti yang luhur sehingga dapat membentuk bangsa yang beradab. Pendidikan berperan penting pula dalam meningkatkan kulitas sumber daya manusia dimana sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengatur dan mengolah sumber daya alam yang ada dengan baik sehingga dapat pula menjadikan negara nya sebagai negara maju sebab salah satu syarat negara maju ialah dinilai dari kulitas sumber daya manusia itu sendiri.

Budaya dapat pula dijadikan sebagai usaha untuk memajukan negara dengan membangun citra budaya yang baik dan memperkenalkan budaya yang beraneka ragam di Indonesia ke dunia luar maka akan membuat Indonesia dikenal dengan berbagai ragam budaya yang bisa “dijual” untuk pencitraan baik Indonesia,pengenalan negara Indonesia sehingga berdampak pula dengan perekonomian Indonesia.

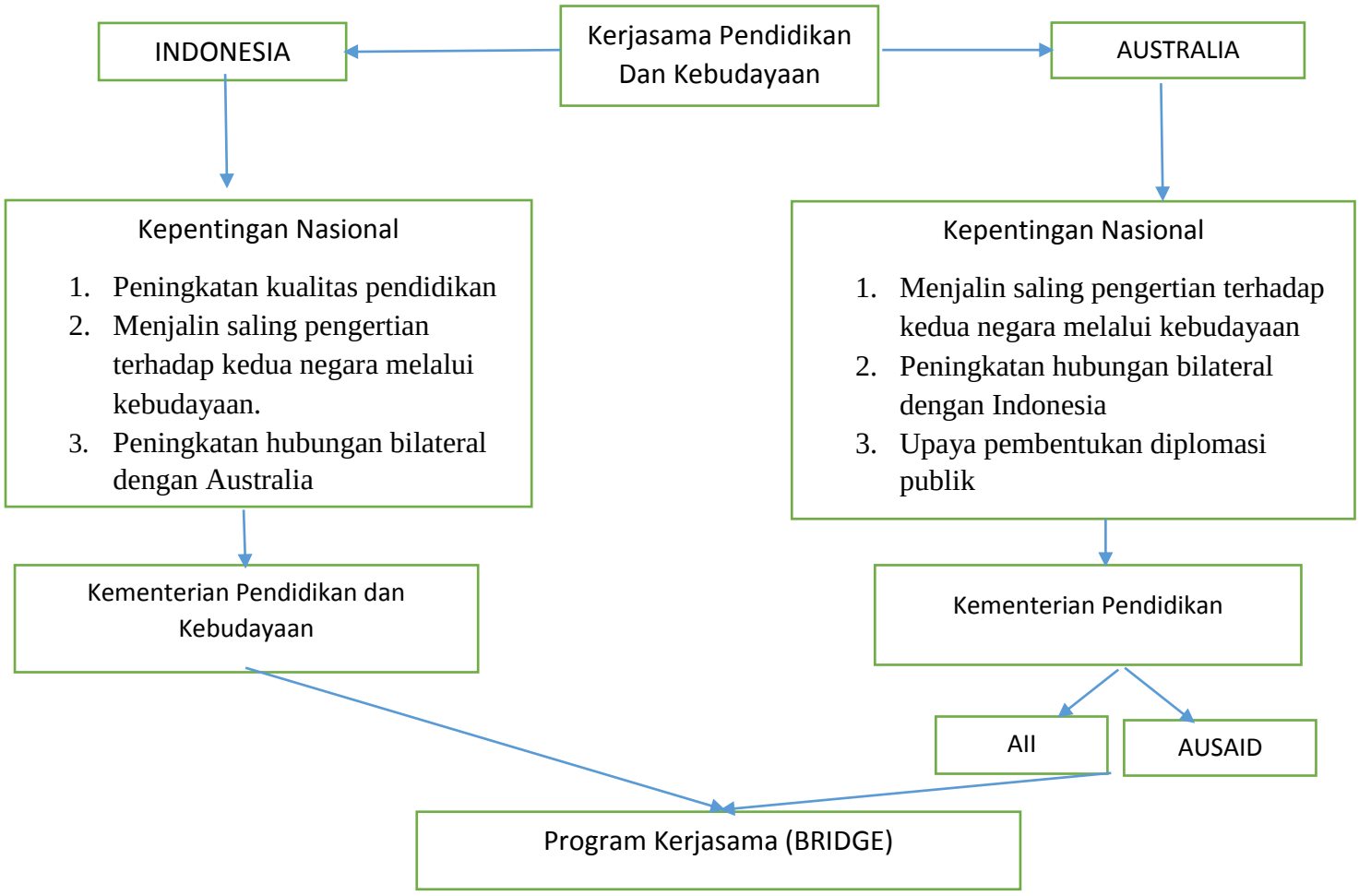
Namun kenyataan dalam pelaksanaannya kualitas pendidikan masih sangat rendah, masih banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan biaya dan tidak meratanya pendidikan, infra struktur yang kurang memadai hingga kualitas guru yang tidak memadai. Budaya Indonesia pun kurang "ditunjukan" sebagai salah satu upaya pembentukan citra Indonesia. Namun dalam perjalanannya, keanekaragaman budaya setiap negara dapat pula menyebabkan permasalahan akibat tidak adanya saling pengertian dan pemahaman budaya antar negara.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dan hambatan itu pemerintah mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju seperti melakukan kerjasama pendidikan dan budaya dengan negara-negara lainnya salah satu nya ialah Australia. Kerjasama Indonesia dan Australia dibidang pendidikan dan budaya telah terjalin sejak tahun 1968 dengan Nota Kesepahaman yang ditanda tangani tanggal 14 Juni 1968 di Jakarta.

Dalam kerjasama tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia memiliki kepentingan nasionalnya yaitu peningkatan kualitas pendidikan, menjalin saling pengertian terhada kedua negara melalui kebudayaan hingga peningkatan hubungan bilateral dengan Australia. Sedangkan Australia memiliki kepentingan nasional yaitu menjalin saling pengertian terhadap kedua negara melalui kebudayaan, peningkatan hubungan bilateral dengan Indonesia hingga melakukan diplomasi publik di Indonesia. Dari kerjasama bilateral tersebut terdapat berbagai program kerjasama salah satunya ialah program BRIDGE, program kerjasama dibidang pendidikan dan

kebudayaan yang dibentuk tahun 2008 hingga 2016 melalui antar pemerintah yang ditandatangi oleh antar kementerian pendidikan dan kebudayaan, program BRIDGE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan antar guru dan murid hingga pemahaman antar budaya. Program ini diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan kualitas pendidikan nya dan dapat menjadi alat untuk kedua negara mencapai kepentingan nasional masing-masing.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran